

## **Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

**<sup>1</sup>Khezia Aghata Fania Putri, <sup>2</sup>Lailatus Syarifah, <sup>3</sup>Indah Prabawati, <sup>4</sup>Firre An Suprpto**

<sup>1234</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[25040674164@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674164@mhs.unesa.ac.id), <sup>2</sup>[25040674165@mhs.ac.id](mailto:25040674165@mhs.ac.id), <sup>3</sup>[firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id),

<sup>4</sup>[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

---

#### **Keywords:**

Social Assistance,  
Public Policy,  
Poverty,  
SDG 1

**Abstract:** Poverty remains one of the social issues that continues to pose a major challenge to development in various regions, particularly in Indonesia. The government has also introduced various social assistance policies as part of its efforts to improve public welfare and reduce poverty rates. This study aims to analyse the implementation of social assistance policies in regional poverty alleviation efforts and their relationship with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the first goal, which is to eradicate existing poverty. The method used in this study is a literature review, examining various journals, books, and scientific sources relevant to the research topic. The findings indicate that social assistance policies play a crucial role in alleviating the economic burden on the poor, improving access to basic needs, and supporting the achievement of SDG 1. However, the implementation of these social assistance programmes still faces various challenges, such as targeting accuracy, distribution effectiveness, and oversight during implementation. Therefore, improvements in policy implementation are required so that these social assistance programmes can operate more effectively in tackling poverty.

---

#### **Kata Kunci:**

Bantuan Sosial  
Kebijakan Public,  
Kemiskinan,  
SDGS 1

**Abstrak:** Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan utama dalam Pembangunan di berbagai daerah terutama di Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah serta keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan pertama yaitu memberantas kemiskinan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta mendukung pencapaian target SDGs 1. Namun demikian, pelaksanaan program bantuan sosial ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketepatan sasaran, efektivitas distribusi, serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan agar program bantuan sosial ini dapat berjalan lebih efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

---

#### **Article History:**

Received : 01-04-2026

Accepted : 30-05-2026



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

## A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Wahyudi, 2020). Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan (Agus Triono & Sangaji, 2023). Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial (Dewa Satrya, 2025). Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah melalui program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu (Purba et al., 2025). Program bantuan sosial di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Despriyani et al., 2024). Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan (Sari et al., 2025). Namun, implementasi kebijakan bantuan sosial yang sudah berjalan di berbagai daerah ini masih menghadapi banyak sejumlah tantangan. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, keterbatasan data masyarakat yang miskin, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi efektivitas berjalannya program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Didit Waluyo et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, perlu kajian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial dalam upaya penganggulangan kemiskinan di daerah serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs Goal 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan yang sudah ada dan mengidentifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di daerah tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode studi literatur ini dilaksanakan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan sosial dan penurunan angka kemiskinan seperti tujuan pada SDGs Goal 1.

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diakses dari berbagai literatur ilmiah dan data lain yang relevan dengan penelitian SDGs ini. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan ini berkaitan dengan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) (Subramaniam et al., 2023).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan bantuan sosial di Indonesia adalah salah satu sarana utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya berada pada tingkat daerah. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Samputra & Ramadhani, 2019). Secara umum, hal ini terbukti dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam waktu jangka pendek, seperti meringankan beban pengeluaran rumah tangganya dan menjaga stabilitas konsumsinya. Tetapi

yang perlu diingat kembali adalah dalam implementasinya masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi berjalannya bantuan sosial ini, di antaranya:

**a. Ketidaktepatan sasaran**

Permasalahan ini masih menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, masih banyak sekali masyarakat yang ditemukan secara ekonominya masih tergolong mampu tetapi menerima bantuan sosial ini, sementara masyarakat yang masih tergolong kurang mampu justru tidak menerima bantuan sosial (Mahmudah et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pembaruan data dan validasi data yang ada pada pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, tujuan awal berjalannya bantuan sosial untuk membantu kelompok yang kurang mampu ini tidak berjalan dengan optimal.

**b. Distribusi bantuan yang belum merata**

Penyaluran bantuan sosial masih mengalami kendala masih sering terlihat dan terjadi di beberapa wilayah terutama wilayah dengan akses yang sulit dan terbatas. Keterlambatan penyaluran dan hambatan seperti ini menyebabkan bantuan yang harusnya diterima oleh masyarakat secara tepat waktu justru tidak diterima dengan waktu yang tepat (Maran, 2025). Kondisi seperti ini semakin membuktikan bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih kurang dan perlu ditingkatkan agar bantuan yang ingin di salurkan bisa berjalan secara merata dan efisien.

**c. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal**

Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial ini pastinya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat desa. Namun, koordinasi antara ketiga lembaga tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Kurangnya sinkronisasi program dan data serta tumpang tindih kebijakan seringkali menjadi penyebab pelaksanaan di lapangannya menjadi tidak maksimal. Hal seperti ini menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan dan komunikasi antar lembaga dalam mendukung keberhasilan program.

**d. Pengawasan yang masih lemah**

Aspek pengawasan juga menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi bantuan sosial. Minimnya transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan bantuan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Peran Bantuan Sosial dalam Mendukung SDGs Goal 1**

Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 1 mempunyai tujuan utama yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. Bantuan sosial menjadi salah satu sarana penting dalam sistem perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah (Obaideen et al., 2022). Bantuan sosial memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui bantuan sosial, masyarakat miskin dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga tingkat kemiskinan, khususnya dalam jangka pendek, dapat ditekan. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada kelompok rentan juga membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat mampu dan tidak mampu sehingga tercipta kondisi sosial yang lebih seimbang. Di samping itu, bantuan sosial turut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Namun

demikian, kontribusi bantuan sosial terhadap pencapaian SDGs belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, keberhasilan bantuan sosial dalam mendukung SDGs sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih efektif dan merata.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan**

Efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah kualitas data penerima bantuan. Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci dalam menentukan ketepatan sasaran bantuan sosial sehingga kebijakan yang dijalankan dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kapasitas aparatur pemerintah juga sangat mempengaruhi keberhasilan program. Aparatur yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan sikap responsif akan mampu melaksanakan program bantuan sosial secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam proses pengawasan dan evaluasi program agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik. Apabila faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan dan diperbaiki, maka implementasi kebijakan bantuan sosial tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar kebijakan bantuan sosial dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam penanggulangan kemiskinan.

### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program bantuan sosial terbukti mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, bantuan sosial juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan pertama yaitu penghapusan kemiskinan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi bantuan yang belum merata, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pengawasan menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar implementasi kebijakan bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Secara ringkas, kesimpulan penelitian ini adalah: Bantuan sosial berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Implementasi kebijakan masih belum optimal. Perbaikan sistem menjadi kunci keberhasilan program. Kontribusi terhadap SDGs Goal 1 cukup signifikan namun belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial. Pemerintah perlu melakukan pembenahan secara sistematis, terutama dalam aspek data, distribusi, dan pengawasan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan sosial.

**REFERENSI**

- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Despriyani, H. L., Imanda, A., & Rikardo, Y. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. *Jurnal Professional*.
- Dewa Satria. (2025). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2023. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eep.2025.v14.i06.p02>
- Didit Waluyo, Fenti Prihtini Tui, & Yakob Noho Nani. (2025). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula. *Journal Education and Government Wiyata*. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>
- Mahmudah, R., Baihaqi, A., & Jumaidi. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Maran, S. D. (2025). Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Verifikasi Kelayakan Penerima Pkh Di Desa Daniwato. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*. <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.7179>
- Obaideen, K., Shehata, N., Sayed, E. T., Abdelkareem, M. A., Mahmoud, M. S., & Olabi, A. G. (2022). The role of wastewater treatment in achieving sustainable development goals (SDGs) and sustainability guideline. *Energy Nexus*. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2022.100112>
- Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M. ., & Togatorop, J. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan : *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*.
- Samputra, P. L., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14227>
- Sari, H. D., Jabbar, A., Dema, H., Sasaran, K., Bantuan, P., Tunai, L., Desa, D., Kecamatan, B., & Riase, P. (2025). Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*.
- Subramaniam, N., Akbar, S., Situ, H., Ji, S., & Parikh, N. (2023). Sustainable development goal reporting: Contrasting effects of institutional and organisational factors. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137339>
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.